

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih tahun 2021- 2026.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser akan sangat diperlukan demi meningkatnya realisasi investasi di daerah, meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih baik dan terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan perbaikan yang dianggap strategis serta sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Tana Paser, 15 Agustus 2023

Kepala DPMPTSP Kab. Paser,



**Jr. Toto Ifrianto, ST., M.Ling**

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP 19731116 199203 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	21
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	21
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD .....	22
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA PD Tahun 2023 .....	33
BAB 4 PENUTUP .....	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu



untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPd Tahun 2023;

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPd dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



## *Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023*

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023;



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD,



Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun 2023 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

#### 2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target Tahun 2023 yang disertai perubahan target .

#### 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

#### 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator



serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

#### **BAB IV PENUTUP**

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.**

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan capaian renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II  
Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
2.18.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	75,2		75,2	38	50,53	75,2	75,2	75,2	
2.18.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	100		100	50	50	100	100	100	
2.18.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		3	2	66,67	3	3	100	
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1		1	1	100	1	1	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.18.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100	100	100	100	100	100	
2.18.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30		30	30	100	30	30	100	
2.18.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1		1	1	100	1	1	100	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100		100	25	25	100	100	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
		<b>kepegawaian</b>									
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40		40	-	-	40	40	100	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1		1	-	-	1	1	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
		Perundang-Undangan yang Disediakan									
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2		2	1	50	2	2	100	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	-	-	1	1	100	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		1	-	-	1	1	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1		1	1	100	1	1	100	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17		17	3	17,65	17	17	100	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam ribu</b>	<b>725</b>		<b>725</b>	<b>320</b>	<b>44,14</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>100</b>	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2		2	1	50	2	2	100	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1	-	-	1	1	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor non tambang dan non sawit	62		62	27	43,55	62	62	62	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3		3	1	33,33	3	3	100	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	-	-	1	1	100	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2		2	-	-	2	2	100	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04		81,04	40	49,36	81,04	81,04	81,04	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi	81,04		81,04	40	49,36	81,04	81,04	100	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	922		922	457	49,57	922	922	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
2.18.04.2.01.02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20		20	9	45	20	20	100	
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan</b>	<b>62</b>		<b>62</b>	<b>27</b>	<b>43,55</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)</b>	<b>62</b>		<b>62</b>	<b>27</b>	<b>43,55</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	22		22	9	40,91	22	22	100	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20		20	6	30	20	20	100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20		20	6	30	20	20	100	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal</b>	70		70	27	38,57	70	70	70	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	70		70	27	38,57	70	70	100	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1		1	1	100	1	1	100	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKAD menyelenggarakan fungsi:

1. penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
2. perencanaan program di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan;
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengkoordinasian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang

tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	30	35	40	45	50	27	77,14
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar)	690	725	761	837	921	320	44,14
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,02	81,04	81,06	81,07	81,12	50	61,69
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	75,2	75,5	75,8	80	69,59	92,53

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi, dimana target yang ditetapkan adalah 35 % dengan realisasinya 27 % capaian kinerja sebesar 77,14%;
- b. Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar) dimana target yang ditetapkan adalah 725 milyar sampai dengan triwulan II ini realisasinya 320 milyar capaian kinerja sebesar 44,14 %;

- c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana target yang ditetapkan adalah 81,04 sampai dengan triwulan II ini realisasinya 50% capaian kinerja sebesar 61,69%;
- d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dimana target yang ditetapkan adalah 75,2 dengan realisasinya 69,59 capaian kinerja sebesar 92,53%;

### **2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023**

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagian besar sudah diatas 50% dari target yang ditetapkan. Hanya saja untuk sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi masih dibawah 50 %. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sampai dengan Periode Juni 2023 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

- a. Belum Optimalnya kinerja realisasi investasi terkait pelaporan kegiatan penanaman modal dari perusahaan sehingga Perangkat Daerah belum mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid.
- b. Belum optimalnya implementasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikarenakan keterbatasan sarana transportasi yang diperlukan untuk kegiatan ke

lapangan

c. Belum optimalnya pengawasan karena kurangnya SDM.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur secara reguler melalui bimbingan teknis/pelatihan/studi tiru pengayaan informasi dan peningkatan kapasitas.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung tugas lapangan
3. Meningkatkan kinerja pelaporan kegiatan penanaman modal melalui pembinaan dan sosialisasi tatacara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Tujuan dan Sasaran**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target	
			Renja 2023	Perubahan Renja 2023
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi Definisi Operasional : Persentase Pertumbuhan Investasi adalah kondisi yang menunjukkan kenaikan atau penurunan pertumbuhan dengan membandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya	35	35
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar)	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN PMA Definisi Operasional : Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah seluruh Nilai Investasi PMA dan PMDN dalam Bentuk Rupiah	725	725
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey IKM satu tahun sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016. Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	81,04	81,04

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP perangkat daerah atas review Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Definisi Operasional : SAKIP merupakan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja oleh evaluator SAKIP (APIP Inspektorat)	75,2	75,2
---	-----------------------------	---	------	------

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 tidak mengalami perubahan namun terdapat perubahan/penambahan dari sisi anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja serta penyesuaian beberapa sub kegiatan sebagai antisipasi tuntutan kebutuhan yang bersifat mendesak.

### 3.2 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Menciptakan Kesejahteraan yang Merata di seluruh Kabupaten Paser” yang dijabarkan ke dalam rangka Penguatan Perekonomian melalui empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan Dunia Usaha
2. Pertanian
3. Industri
4. Pariwisata dan
5. Jasa Produktif lainnya

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatkan lingkungan Daerah Yang Kondusif

6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu **“Meningkatnya multiplier effect sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan”**.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran Tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	75,2	6.871.286.719	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	75,2	6.871.286.719	
A.1	<i>Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab Paser	Presentase Capaian Sasaran strategis	100	133.812.519	<i>Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab Paser	<i>Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten</i>	100	133.812.519	
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	62.678.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	62.678.900	
A1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	58.199.819	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	58.199.819	
A1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.933.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.933.800	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.224.441.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.224.441.300	
A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	30	5.730.333.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	30	5.730.333.100	
A2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1	494.108.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1	494.108.200	
A3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Paser	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Paser	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100	65.000.000	
A3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	65.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	65.000.000	
A4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Paser	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	406.537.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Paser	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	406.537.100	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
A4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.723.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.723.000	
A4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33.873.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33.873.900	
A4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.103.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.103.000	
A4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.141.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.141.600	
A4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.688.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.688.800	
A4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	291.006.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	291.006.800	
A5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab Paser	<b>Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>11.025.800</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab Paser	<b>Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>11.025.800</b>	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	
A5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9.025.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9.025.800	
A6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab Paser</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100</b>	30.470.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab Paser</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100</b>	30.470.000	
A6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2.000.000	
A6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	21.000.000	
A6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	7.470.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	7.470.000	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
B	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam ribu</b>	<b>725</b>	523.040.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam ribu</b>	<b>725</b>	523.040.000	
B1	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>2</b>	523.040.000	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>2</b>	523.040.000	
B1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	348.040.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	348.040.000	
B1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	175.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	175.000.000	
C	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Jumlah investor non tambang dan non sawit</b>	<b>62</b>	579.246.000	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Jumlah investor non tambang dan non sawit</b>	<b>62</b>	579.246.000	
C1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	579.246.000	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	579.246.000	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
C1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	257.002.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	257.002.000	
C1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	322.244.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	322.244.000	
D	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>81,04</b>	968.861.850	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>81,04</b>	968.861.850	
D1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi</b>	<b>81,04</b>	968.861.850	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi</b>	<b>81,04</b>	968.861.850	
D1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	922	904.861.850	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	922	904.861.850	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
			Terintegrasi Secara Elektronik					Terintegrasi Secara Elektronik			
D1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab Paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	64.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab Paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	64.000.000	
E	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan</b>	<b>62</b>	<b>605.800.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan</b>	<b>62</b>	<b>605.800.000</b>	
E1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)</b>	<b>62</b>	<b>605.800.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)</b>	<b>62</b>	<b>605.800.000</b>	
E1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	22	178.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	22	178.000.000	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
E1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20	249.733.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20	249.733.900	
E1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20	178.066.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20	178.066.100	
F	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Paser	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	
F1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Paser	<b>Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	
F1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab Paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	1	131.199.857	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab Paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	1	131.199.857	

*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023*

Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)			Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)			

### **3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser

### **3.4 . Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023**

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023, maka pada Renja Perubahan ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.3  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2023

Pagu Sebelum Perubahan					Pagu Rancangan Akhir Perubahan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>9.048.748.426</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>9.675.002.145</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat</b>	<b>75,2</b>	<b>6.672.336.719</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat</b>	<b>75,2</b>	<b>6.795.270.438</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase Capaian Sasaran strategis</b>	<b>100</b>	<b>109.012.519</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase Capaian Sasaran strategis</b>	<b>100</b>	<b>149.612.519</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	62.678.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	62.678.900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	33.399.819	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	73.999.819	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.933.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.933.800	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>6.224.441.300</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>5.735.009.019</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	5.730.333.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	5.240.900.819
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1	494.108.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1	494.108.200
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	65.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	65.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>232.387.100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>420.537.100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.723.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.723.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7.123.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	77.873.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.103.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	56.103.000
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1	30.141.600	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1	30.141.600

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

		Penggandaan yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.688.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.688.800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	143.606.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	246.006.800	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>383.616.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	383.616.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>11.025.800</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>11.025.800</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9.025.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9.025.800	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100</b>	<b>30.470.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100</b>	<b>30.470.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	1	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	1	21.000.000	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	7.470.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	7.470.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>725</b>	<b>523.040.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>725</b>	<b>523.040.000</b>	
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>2</b>	<b>523.040.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>2</b>	<b>523.040.000</b>	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	348.040.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	348.040.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	175.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	175.000.000	
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah investor non tambang dan non sawit</b>	<b>62</b>	<b>236.600.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah investor non tambang dan non sawit</b>	<b>62</b>	<b>534.446.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	<b>236.600.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	<b>534.446.000</b>	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	97.600.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	237.202.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	139.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	297.244.000	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04	879.771.850	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04	966.745.850	
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kabupaten Paser	Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi	81,04	879.771.850	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kabupaten Paser	Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi	81,04	966.745.850	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	922	815.771.850	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	922	902.745.850	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	64.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	64.000.000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Paser	Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan	62	605.800.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Paser	Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan	62	724.300.000	
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	62	605.800.000	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	62	605.800.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	22	178.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	22	296.500.000	

*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023*

		Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20	249.733.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20	249.733.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20	178.066.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20	178.066.100	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	<b>Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>70</b>	<b>131.199.857</b>	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	131.199.857	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	131.199.857	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser .

Selain itu Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Paser ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Perubahan Rencana Kerja sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
- f. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.



#### 4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Renja ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Tanah Grogot, 15 Agustus 2023

Kepala DPMPSTSP Kab. Paser



H. Toso Brianto, ST., M.Ling

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19731116 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. RM. Noto Sunardi Nomor 01 Telp. (0543) 21008-21071  
TANA PASER Kode Pos 76211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 570/KEP-294/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Umum Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU :
- Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sebagai berikut :
- Ketua : Ir. Toto Ifrianto, ST, M.Ling (Kepala pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)
- Sekretaris : Muhammad Erwin, SE (Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)
- Anggota PNS : 1. Akhmad Faridi Wijaya, SE., M.Si (Perencana Ahli Muda dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)  
2. Vera Juliati Simamora, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)
- Anggota Non PNS : 1. Rachman Achyan, A.Md (Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)  
2. Noorhasanah, S.I.P (Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser)

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. membuat dan menyusun Laporan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser; dan
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASER,



**Drs. Katsul Wijaya, M.Si**  
Pembina Utama Madya/(IV/d)  
NIP. 19661211 198609 1 002